

**Muhammadiyah dan Gerakan *Civil Society*:
Bergerak Membangun Kultur Madani**

Syarifuddin Jurdi

Jurusan Sosiologi Politik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islkama Negeri Alauddin Makassar-Gowa
Jl. Andi Tonro Makassar

Abstrak

Kebangkitan kaum santri kota berjuang melawan empat seteru: formalisme kolot, kebudayaan adat dan priyayi, sikap kebarat-baratan, dan status quo penjajahan.¹

Keywords

Muhammadiyah-Gerakan civil society-kultur Madani

I. Pendahuluan

Muhammadiyah¹ merupakan gerakan sosial Islam yang bersifat multi-wajah, aktivitasnya tidak hanya pada ranah masyarakat dengan menggiatkan bidang agama, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, tetapi juga pada ranah struktur politik kenegaraan. Peran maupun respons Muhammadiyah dalam dinamika sosio-politik Indonesia ditentukan oleh watak rezim berkuasa. Sebagai kekuatan sosial kemasyarakatan, Muhammadiyah memiliki komitmen pada penguatan basis (umat) agar mereka memiliki kesadaran teologis, sosial, politik dan terus-menerus melakukan berbagai aktivitas yang dapat mentransformasi masyarakat menuju kepada suatu strata yang baik.

Memperbincangkan Muhammadiyah sebagai kekuatan *civil society* tentu tidaklah mungkin dapat dilepaskan dari berbagai doktrin dan ideologi gerakannya, sejak awal berdiri, Muhammadiyah telah merumuskan sejumlah kerangka ideologis untuk memandu berbagai aktivitasnya pada ranah masyarakat maupun politik. Berbagai kerangka ideologi Muhammadiyah dapat disebutkan, diantaranya Langkah 12 yang dicetuskan oleh KH. Mas Mansur tahun 1938-1940, Muqaddimah Anggaran Dasar yang diinisiasi oleh Ki Bagus Hadikusumo yang kemudian dilembagakan pada awal tahun 1950-an yang secara komprehensif memberi panduan bagi pergerakan Muhammadiyah, kemudian ada Kepribadian Muhammadiyah yang memperjelas posisi dan status Muhammadiyah, setelah itu muncul kebijakan baru lagi yakni Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah yang dilembagakan pada akhir periode kepemimpinan Letkol HM. Yunus Anis sebagai ketua PP dan efektif dijalankan pada kepemimpinan KH. Ahmad Badawi.

Sejak keterlibatan aktifnya dalam politik sebagai anggota istimewa Masyumi, Muhammadiyah telah merumuskan Khittah perjuangan yakni Khittah Palembang tahun 1956-1959 yang berisi penjelasan umum mengenai Muhammadiyah seperti menguatkan komitmen untuk berbuat kebaikan, memperdalam tauhid, mempertinggi mutu amal, khittah ini tidak secara khusus membahas masalah politik, mengingat

Muhammadiyah bagian Masyumi. Kemudian Khittah Ponorogo 1969 yang mengeaskan pentingnya untuk menggiatkan gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*, tidak hanya diarahkan pada bidang sosial kemasyarakatan, tetapi juga dalam bidang politik. Khittah ini juga menegaskan mengenai pentingnya Muhammadiyah membina satu partai politik sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi warganya, pilihan yang tersedia ketika itu Parmusi (partai Muslimin Indonesia, didirikan tahun 1968 di Malang). Dua tahun kemudian, lahir khittah Ujung Pandang 1971 yang secara tegas dan jelas menegaskan posisi Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan yang tidak terkait dengan partai politik manapun (netral), tetapi memberi kebebasan kepada anggota untuk masuk atau tidak dalam partai politik tertentu. Khittah ini diperkuat lagi dengan Khittah Surabaya 1978 sebagai gerakan sosial yang memperkuat struktur sosial, mendorong kemandirian dan independensi masyarakat.

Berbagai doktrin tersebut telah menegaskan bahwa Muhammadiyah sebenarnya secara konseptual merupakan kekuatan *civil society* yang secara konsisten mendorong kemandirian, kesukarelaan, keswadayaan dan transformasi masyarakat. Hal itu juga tergambar dengan baik dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah yang diputuskan melalui Muktamar Jakarta 2000. Dua tahun kemudian lahir kebijakan baru dalam soal politik yakni Khittah Denpasar 2002, untuk khittah ini nanti akan saya jelaskan secara singkat pada penjelasan ideology Muhammadiyah, selain itu ada juga Pernyataan Menjelang Satu Abad diputuskan Muktamar Malang 2005, serta Pernyataan Abad Kedua diputuskan Muktamar Yogyakarta tahun 2010.

Civil Society: Keragaman Definisi dan Posisi Muhammadiyah

Dalam sistem politik yang otoriter, *civil society* tidak bisa eksis dan bahkan tidak dapat menjadi dirinya sendiri. Demokrasi mensyaratkan adanya kesediaan tiap individu untuk menerima berbagai pandangan, sikap dan tingkah laku sosial serta terbukanya ruang publik yang bebas, karena itu demokrasi tidak menghalangi pandangan-pandangan alternatif bagi penyelesaian atas masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-bangsa, sekaligus tidak ada jawaban yang "mutlak" hanya ada satu terhadap suatu masalah, tetapi tersedia banyak pilihan, tinggal memilih tawaran kebijakan apa yang paling baik bagi transformasi sosial masyarakat. Kondisi politik yang demokratis dengan kesediaan tiap individu untuk berbeda dalam berbagai masalah yang dihadapi, disitulah *civil society* bisa eksis dan menjadi dirinya sendiri.

Perbincangan mengenai *civil society* (masyarakat madani) mulai populer di Indonesia sekitar tahun 1990-an. Bermula dari seminar nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) di Kupang dengan tema *civil society* yang diterjemahkan dengan "masyarakat warga atau kewargaan" tahun 1995. Jauh sebelum itu gagasan *civil society* telah muncul dan berkembang dalam bentuknya yang lain di Indonesia seperti konsep Muhammadiyah mengenai "masyarakat utama"² dalam rumusan tujuannya pada Muktamar ke 41 di Solo tahun 1985, dan pada saat yang sama muncul gerakan-gerakan pro-demokrasi yang dianggap sebagai pilar bagi bangunan *civil society* di Indonesia, seperti Fordem (Forum Demokrasi) yang didirikan oleh Gus-Dur, Djohan Effendi, Marsilam Simanjuntak dan beberapa orang tokoh kritis lainnya.

Dalam versi Islam, *civil society* diterjemahkan sebagai masyarakat madani, istilah ini sendiri pertama kali diperkenalkan dan menjadi perbincangan publik,

setelah mantan wakil Perdana Menteri Malaysia Dato Anwar Ibrahim memberikan ceramah pada Festival Istiqlal tahun 1995 di Jakarta. Dalam ceramahnya Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa masyarakat madani mendasarkan diri pada agama sebagai sumber, peradaban adalah prosesnya dan masyarakat kota adalah hasilnya. Jadi masyarakat madani merupakan pilar utama bagi upaya untuk mewujudkan peradaban yang maju, yakni peradaban yang menjunjung tinggi pluralisme dan semua golongan dalam masyarakat dapat hidup secara damai dan sejahtera. Masyarakat madani merupakan usaha untuk membentuk peradaban dengan budaya kota yang berkeadaban dan perwujudan masyarakat *baldatun thoyyibatun warabaun ghafur*.

Konsep *civil society*³ yang biasa dipakai oleh para ilmuwan sosial politik di Indonesia sebagai entitas independen dari *state* diartikan dalam berbagai istilah seperti masyarakat sipil,⁴ masyarakat warga atau masyarakat kewargaan,⁵ untuk kebutuhan ini digunakan istilah Masyarakat madani,⁶ pemakaian istilah ini lebih mendekati esensi dari *civil society* untuk konteks Indonesia. Menurut Maswadi Rauf, bahwa masyarakat madani lebih dekat dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan munculnya ketidakpuasan sebagian besar masyarakat atas praktek politik Orba yang telah menjauhkan nilai-nilai demokrasi dan menciptakan rezim otoritarian. Tulisan ini akan menggunakan secara bergantian istilah *civil society* dan masyarakat madani.

Sebagai kekuatan yang menopang terwujudnya kehidupan yang demokratis, masyarakat madani (*civil society*) yang merupakan representasi dari banyak lembaga-lembaga independen diluar *state* telah mendorong proses politik yang lebih mencerminkan kehendak rakyat. Kekuatan masyarakat madani selama rezim militer Orde Baru tidak mendapat tempat yang layak, karena *public sphere* dikendalikan, diawasi atau di kontrol secara ketat oleh negara.⁷ Pemikiran-pemikiran alternatif dari berbagai aliran dalam masyarakat hampir tidak mendapat tempat yang layak pada masa pemerintahan Orba, semua diseragamkan berdasarkan keinginan penguasa, sehingga para peserta didik (pelajar dan mahasiswa) ditatar melalui penataran P4 (pedoman penghayatan & pengamalan Pancasila).⁸

Sejalan dengan membangun masyarakat yang kuat, dan upaya mewujudkan peradaban yang unggul, maju dan kuat merupakan cita-cita masyarakat madani. Masyarakat madani sebagai entitas tersendiri yang terpisahkan dari masyarakat politik, ia *concern* pada teriptanya kehidupan publik yang bebas. Dalam hal ini, masyarakat tidak harus berlawanan atau berhadap-hadapan dengan negara, karena hakekat dari pemerintahan demokratis menghendaki pemerintah untuk memerintah masyarakat madani secara tidak berlebihan, tetapi juga tidak terlalu sedikit, artinya pemerintah tetap merupakan faktor krusial bagi proses demokratisasi dan reformasi politik yang merupakan agenda berbagai gerakan dan kelompok reformasi dalam masyarakat ke arah pembentukan masyarakat madani.⁹ Negara (pemerintah) yang demokratis akan menyelenggarakan tugas-tugasnya melayani publik dan melindungi warga negara dari segala ancaman dan gangguan dari manapun karena negara merupakan representasi dari rakyat, sementara masyarakat madani menjadi alat pengawas terhadap berbagai kebijakan negara.

Pengawasan masyarakat terhadap negara dilakukan melalui Perwakilan Rakyat yang merupakan lembaga politik resmi yang menjalankan fungsi-fungsi pengawasan/kontrol terhadap pemerintah. Masyarakat dapat berperan untuk melakukan pencerahan kepada masyarakat melalui pendidikan politik, dengan cara itu, masyarakat akan memiliki kesadaran politik yang tinggi sehingga memahami

berbagai proses sosial politik yang terjadi dengan cepat, dan perubahan itu jauh lebih kompleks dan lebih rumit dari banyak masalah pribadi yang mereka hadapi setiap saat dalam kehidupannya.

Dalam proses pembentukan masyarakat madani, adalah penting suatu pemerintahan politik yang demokratis, kalau sistem politik yang tidak demokratis adalah juga mustahil untuk membangun masyarakat madani yang independen dan mandiri. Menurut Giuseppe Di Palma, bahwa masyarakat madani adalah bagian organik sistem demokrasi, yang secara definisi berada dalam posisi perlawanan (*oppositional*) terhadap rezim-rezim absolutis, masyarakat madani adalah musuh alamiah otokrasi, kediktatoran, dan bentuk-bentuk lain yang sewenang-wenang.¹⁰ Liberalisasi politik merupakan faktor terpenting bagi bangunan masyarakat madani, antara negara (pemerintah) dengan gerakan-gerakan pro-demokrasi dan organisasi-organisasi sosial harus membangun hubungan kerjasama yang saling kooperatif dan bukan dalam bentuk konflik.

Masyarakat madani artinya berkembangnya organisasi-organisasi otonom yang memfasilitasi berbagai kegiatan sosial, ekonomi, politik yang tertib (*civilized*). Kehadiran masyarakat madani guna menciptakan masyarakat *civilized* (berkeadaban) yang merupakan faktor pendukung bagi proses demokratisnya suatu masyarakat, tanpa masyarakat madani yang tertib dan teratur, akan sulit menciptakan pemerintahan sipil yang demokratis. Di Iran basis utama masyarakat madani adalah *dawrah* (secara literal berarti "lingkaran") yang merupakan kelompok informal individu-individu yang bertemu secara periodik. Kelompok ini dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan profesi keagamaan, politik, sosial, dan ekonomi.¹¹ Para anggota *dawrah* terlibat dalam berbagai pertukaran informasi dan visi untuk membangun Iran yang lebih *civilized* dan bebas dari opresi negara.¹² Di Polandia para pejuang mengusung "*program of self-limitation*" yang bertumpu pada dua hal yakni pengorganisasian masyarakat dari bawah dan targetnya diarahkan pada *civil society* bukan Negara. Di Jerman, *civil society* hadir sebagai jawaban atas krisis *welfare state*, di Perancis *civil society* muncul sebagai jawaban atas semakin otoriternya kapitalisme, di Amerika *civil society* hadir sebagai alternative terhadap kelas, di Amerika Latin *civil society* hadir sebagai jawaban untuk mengisi ruang di antara keluarga dan kelompok *face-to-face* dengan Negara.¹³

Elemen penting lain dari *civil society* adalah ekonomi pasar, media komunikasi yang independen, faktor-faktor keahlian dalam semua aspek kebijakan pemerintah yang independen dari pengaruh negara, dan jaringan kelompok-kelompok sukarela yang berkembang secara leluasa pada semua bidang kehidupan sosial, yang dengan itu orang-orang menangani urusan-urusan mereka sendiri.¹⁴ Kesukarelaan dan kemandirian merupakan ciri terpenting dari masyarakat madani yang tertib, teratur dan berkeadaban. Antara pemerintahan yang dihasilkan melalui pemilihan yang demokratis akan melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat yang terorganisir.

Pemikir politik terpenting abad ke XX berkebangsaan Italia Antonio Gramsci (1891-1937) mengemukakan gagasannya tentang hegemoni yang merupakan landasan alternatif terhadap teori Marxis. Pandangan Gramsci mengenai masyarakat madani memiliki kesamaan dengan gerakan sosial, bagi Gramsci di zamannya terjadi konfliktual dan dialektika antara "negara" (*state*) dan "masyarakat madani" (*civil*

society) dalam analisisnya tentang supremasi dan hegemoni. Gramsci seperti dikutip Mansour Fakih

Apa yang dapat kita kerjakan, sejenak adalah menyediakan dua “aras” super-struktur, satu yang dapat disebut “masyarakat sipil (madani)”, yakni *esemble* organisme yang biasanya disebut “privat”, dan aras lain yaitu “masyarakat politik” atau “negara”. Dua aras ini pada satu sisi hubungan dengan fungsi hegemoni dimana kelompok dominan menjalankan seluruh masyarakat dan sisi lain berhubungan dengan “dominasi langsung” atau perintah yang dijalankan melalui negara dan pemerintahan “juridis”¹⁵

Antara masyarakat madani dengan negara merupakan dua entitas yang berbeda. Yang satu merupakan lingkungan privat dan yang lain merupakan arena publik yang bebas untuk mengartikulasikan berbagai sikap-sikap politik, masyarakat madani merupakan arena transformasi sosial politik menuju pada perubahan yang lebih demokratis, sementara yang lain (negara) merupakan arena publik yang dikontrol melalui hegemoni oleh kekuasaan negara. Bagi Gramsci masyarakat madani adalah suatu dunia dimana rakyat membuat perubahan dan sejarah masa depan masyarakat mereka. Secara rinci Nurcholis Madjid memberikan kerangka konsep untuk memahami istilah masyarakat madani dalam kaitannya dengan proses perubahan masyarakat menjadi lebih demokratis

Bahwa demokrasi sebagaimana yang dipahami di negara maju harus punya “rumah”, maka rumahnya adalah “masyarakat madani” (*civil society*), dimana berbagai macam perserikatan, klub, gilda, sindikat, federasi, persatuan, partai, dan kelompok-kelompok bergabung menjadi perisai antara negara dan warga negara. Keberadaan dari masyarakat madani mendorong proses demokratisasi, karena yang menjadi inti dari konsep ini adalah terbukanya ruang publik bagi keterlibatan rakyat, masyarakat madani adalah bagian yang tak terpisahkan dari demokrasi dan sekaligus menjadi lawan bagi rezim-rezim absolutis.¹⁶

Eksisnya masyarakat madani adalah terbukanya *public sphere* (ruang publik) secara luas yang menyebabkan masyarakat (rakyat) dapat terlibat secara aktif dalam mendorong demokratisasi, antara masyarakat madani dengan demokrasi merupakan dua hal yang sulit untuk dipisahkan, keduanya merupakan musuh dari rezim-rezim absolutis. Rezim otoriter (totalitarianisme) berusaha untuk mematikan ruang publik dan segala pemikiran-pemikiran kritis, organisasi sosial, dan asosiasi lainnya dikontrol secara ketat oleh negara, karena itu independensi masyarakat madani hilang, karena dikooptasi oleh negara. Keswadayaan, kesukarelaan, dan kemandirian adalah hal yang sulit dipisahkan dari masyarakat madani. Hikam mengatakan, bahwa masyarakat madani (*civil society*) didefinisikan sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dengan ciri-ciri kesukarelaan, keswadayaan, keswasembadaan, dan kemandirian berhadapan dengan negara... kebersamaan, kepercayaan, tanggungjawab, toleransi, kesamarataan, kemandirian, dan seterusnya merupakan esensi dalam sebuah *civil society* yang mandiri dan kuat.¹⁷

Masyarakat madani berfungsi sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan negara, kehadiran masyarakat madani yang kuat akan menjadi alat

kontrol terhadap kekuasaan negara, dan negara harus menyediakan tempat bagi eksisnya masyarakat madani. Negara tidak mempunyai alasan untuk mendikte masyarakat agar mau mengikuti kehendaknya, karena kehadiran masyarakat madani merupakan entitas yang terlepas dari pengaruh negara (*political society*). Antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*) harus terjadi *check and balance* dalam mencapai kehidupan politik yang demokratis. Dalam sistem demokratis, pemerintah menjalankan kekuasaan berdasarkan nilai-nilai keadilan, tunduk dan taat serta patuh kepada hukum, dengan berpegang pada keadilan dan kepatuhan dan tunduk kepada hukum kehidupan bernegara berjalan diatas kepentingan masyarakat dan bukan berdasarkan segelintir kepentingan kelompok dan individu.

Masa depan masyarakat madani akan sangat ditentukan oleh dua hal; *pertama*, kesiapan warga masyarakat sendiri untuk memainkan peran yang aktif sehingga dianggap cukup kuat oleh pihak negara; *kedua*, sikap penguasa politik.¹⁸ Kalau penguasa politik bertindak berlebihan akan menghambat tumbuhnya masyarakat madani, tetapi kalau penguasa bertindak bijak, arif dan demokratis akan membuat posisi masyarakat madani kuat dan diperhitungkan. Kehadiran masyarakat madani merupakan sesuatu yang penting untuk mendukung proses demokratisasi atau menciptakan kehidupan masyarakat menjadi lebih berkeadaban. Terbentuknya masyarakat madani merupakan bagian mutlak dari ciri-ciri kenegaraan, yaitu mewujudkan keadilan sosial.¹⁹

Dalam konteks keragaman gagasan dan varian-varian *civil society* itulah, posisi Muhammadiyah dapat dipotret sebagai suatu kekuatan masyarakat yang oleh sebagian kalangan dimasukkan dalam kelompok *civil society*. Sebagai kekuatan *civil society*, Muhammadiyah termasuk organisasi yang sulit hadir sebagai kekuatan *civil society* karena begitu kuatnya hubungannya dengan Negara dan bahkan Presiden Soeharto secara terbuka telah mengakui bahwa dirinya adalah anak didik Muhammadiyah. Kendati Muhammadiyah telah merumuskan konsep masyarakat yang ideal dan melakukan berbagai aktivitas sukarela untuk merealisasikan visi kemasyarakatan itu, namun tidak dipandang sebagai suatu kelas sosial yang efektif untuk menyediakan infrastruktur masyarakat yang mandiri dan independen, karena Muhammadiyah sendiri bukanlah organisasi yang mandiri dalam pembiayaan kegiatannya, meski memiliki berbagai amal usaha, tetapi itu tidak cukup membantu menyukseskan sejumlah kegiatannya, akibatnya bantuan dari Negara menjadi pilihan utama. Meski meminta bantuan Negara itu rasional dan obyektif, karena Muhammadiyah membantu Negara dalam berbagai kegiatannya, tetapi langkah mengintegrasikan dirinya dengan Negara dengan begitu kuat telah menjerumuskan gerakan ini menjadi gerakan yang terkooptasi oleh kekuasaan.

Civil society hadir sebagai jawaban atas lemahnya posisi masyarakat berhadapan dengan Negara, ia hadir untuk memajukan dirinya sendiri serta cenderung membatasi diri dari pengaruh dan intervensi Negara yang telah diciptakan sebagai ruang kegiatannya. *Civil society* dimaknai sebagai jaringan produktif dari berbagai kelompok sosial yang mandiri, independen yang terletak antara Negara dan keluarga atau individu. Dalam sistem politik otoriter, Muhammadiyah dipandang sukses menjalankan berbagai kegiatannya, karena watak akomodasional yang kuat sehingga sukses mempengaruhi kebijakan Negara, akibatnya, posisi sebagai kekuatan *civil society* yang semestinya memprakarsai berbagai kerjasama dan membangun kembali ikatan-ikatan sosial yang berada di luar lembaga resmi, menggalang

solidaritas kemanusiaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat menjadi sulit dilakukan oleh Muhammadiyah.

Dalam posisi yang nyaris sulit lagi dipisahkan dari Negara itu, Amien Rais dengan Muhammadiyahnya hadir sebagai suatu kekuatan *civil society* di penghujung kekuasaan Orde Baru dengan mengusung berbagai wacana demokratisasi dan penguatan masyarakat. Isu suksesi digagas Amien Rais pada Tanwir Surabaya 1993 memperoleh respons yang sangat luas dari berbagai pihak, khususnya pejabat Negara, demikian pula dengan gagasannya tentang korupsi, kasus Freeport dan kasus Busang. Langkah penting yang tidak bisa diabaikan adalah pernyataan kesediaan Amien Rais sebagai Calon Presiden pada 1997 yang kemudian diikuti dengan makalahnya pada Ramadhan di Kampus (RDK) UGM yang berjudul "*Keharusan Suksesi 1998*" telah membawa masuk Muhammadiyah ke jantung perdebatan politik, sosial, ekonomi dan kemanusiaan di Indonesia. Apa yang dilakukan Amien Rais sebenarnya sebagai bagian dari interpretasi ideologi Muhammadiyah yakni ideologi *amar ma'ruf nahi munkar*.

Sikap Amien Rais tersebut menurut penilaian saya setidaknya telah membebaskan atau mengurangi stigma bahwa Muhammadiyah merupakan bagian dari Negara. Sikap oposan itu sebagai upaya mengimplementasikan gagasan *amar ma'ruf nahi munkar* yang juga tercermin dengan baik dari teologi Al-Ma'un, suatu doktrin keagamaan yang memandu aktivitas kemanusiaan Muhammadiyah dalam rentang sejarah eksistensinya. Amien Rais diluar kontroversinya, telah melahirkan kembali Muhammadiyah dalam mengimplementasikan doktrin dan gagasan sosial keagamaan Muhammadiyah yang telah dirumuskan sejak gerakan ini berdiri 1912 hingga dewasa ini, karena berhasil meletakkan kembali arah perjuangan Muhammadiyah. Menjadi ketua PP Muhammadiyah pada periode krusial itu memang tidaklah mudah, mengingat posisi Muhammadiyah dan konteks politik yang dihadapi, sekali salah mengoperasionalkan strategi perjuangan, maka akan kehilangan momentum untuk mentransformasi masyarakat. Pada masa itu, Ketua PP bisa menjadi apa saja, kalau saja Amien Rais bersabar, maka ketua Presidium yang bentuk Soeharto pada 1998, sebenarnya Amien Rais sudah menjadi Presiden Indonesia.

Muhammadiyah: Antara Kekuatan Civil Society dan Dakwah

Dalam diskursus tentang *civil society* selalu saja konsep ini dikaitkan dengan berbagai kekuatan *non-state*, Muhammadiyah termasuk dalam kelompok *non-state* yang memperjuangkan tegaknya masyarakat mandiri yang bebas dari intervensi Negara dan dapat menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara efektif melalui suatu mekanisme control terhadap kekuasaan. Perbincangan tentang *civil society* tidak bisa dilepaskan dari persoalan sistem politik dan kekuasaan, khususnya dalam sistem politik yang otoriter. Gerakan sipil di sejumlah Negara secara umum dimainkan oleh kekuatan-kekuatan independen dan kelompok keagamaan yang berkolaborasi untuk membangun masyarakat yang demokratis. Dalam kasus gerakan massa di Filipina yang berhasil menjatuhkan Ferdinand Marcos misalnya dengan jelas gerakan itu merupakan hasil dari inisiasi kekuatan gereja yang tidak bisa lagi mentoleransi kebijakan-kebijakan represif Marcos serta korupsi kekuasaan yang sudah begitu massif. Dalam kasus yang lain misalnya, mobilisasi kekuatan sipil yang merupakan hasil koalisi pimpinan kelompok keagamaan tampak pula dalam gerakan sipil di Polandia yang berhasil melakukan reformasi sistem politik dan kekuasaan.

Dalam kerangka penjelasan yang hampir sama dengan spirit perjuangan tersebut, Muhammadiyah mengkonseptualisasi gagasan *civil society* pada Mukhtamar Solo 1985 yang mengubah azas organisasi dan sekaligus melakukan perubahan terhadap tujuan organisasi, perubahan dari rumusan "...agar terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya", menjadi "menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur"²⁰ sebagai respons kreatif atas kebijakan represif Negara yang memaksakan azas tunggal sebagai azas semua ormas dan partai politik. Adaptasi konseptual ini tidak lalu menggeser seluruh strategi gerakan, bahkan dengan adaptasi konseptual inilah eskalasi gerakan Muhammadiyah semakin luas dan proses ekspansi ke dalam tubuh Negara menjadi semakin intensif dilakukan, hingga memunculkan kesan bahwa Muhammadiyah telah terkooptasi oleh Negara, hal itu ditunjukkan dengan hadirnya sejumlah birokrat dan petinggi Golkar di berbagai daerah sebagai ketua PDM dan PWM. Logika politik sederhana akan muncul bahwa Muhammadiyah bukanlah kekuatan *civil society*, melainkan telah terkooptasi oleh Negara, aparatu Negara masuk menguasai kepemimpinan Muhammadiyah, implikasi dari masuknya para birokrat dan politisi itu adalah lemahnya independensi sikap Muhammadiyah terhadap Negara.

Para birokrat dan politisi yang memimpin sejumlah PDM dan PWM di berbagai daerah sangat tidak menyukai langkah Amien Rais mengoreksi berbagai kebijakan Negara yang tidak aspiratif terhadap kepentingan rakyat. Orang bermuhammadiyah identik dengan kepentingan dan orientasi diri masing-masing untuk mencapai tujuannya, hingga kini, masih ditemukan "kader" yang hanya mencari posisi aman bagi terpenuhinya kepentingan dan ambisi politiknya. Mereka ini, tidak hanya sekedar menciderai prinsip-prinsip moral perjuangan Muhammadiyah, tetapi juga menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan Muhammadiyah mewujudkan masyarakat ideal yang khairah ummah. Dalam hal ini, Muhammadiyah menghadapi masalah internal yang tidak sederhana, selain juga masalah eksternal yang semakin kompleks.

Dari gagasan masyarakat utama yang diinspirasi oleh Al-Farabi dari konsepnya *al-madinah al-fadhilah* itu, Muhammadiyah telah memperkenalkan gagasan *civil society* untuk membangun masyarakat yang mandiri, sukarela dan berswasembada. Untuk mewujudkan masyarakat utama, Muhammadiyah mengembangkan dan menonjolkan konsep perjuangan *amar ma'ruf nahi munkar* artinya umat harus diajak untuk kembali ke ajaran Islam yang otentik, murni dan belum tercemar oleh pengaruh-pengaruh luar Islam. Sikap untuk kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah tidak lalu dianggap sebagai langkah untuk mengukuhkan paham wahabisme dalam Muhammadiyah, tidak juga meletakkan Muhammadiyah sebagai gerakan purifikasi yang ortodok, tetapi sebagai manifestasi dari kuatnya pemahaman keagamaan yang totalistik untuk mendefinisikan kembali nilai-nilai kemanusiaan Islam dengan mengikis habis sinkretisme serta takhayul, bid'ah dan khurafat.

Ketika umat telah menjalankan ajaran Islam secara murni, maka proses menuju kepada terbentuknya pilar-pilar masyarakat madani akan tampak. Kebersihan keimanan dan keyakinan merupakan syarat penting dalam membangun umat yang kuat, jujur, dapat bersikap adil dalam segala hal, dan memiliki kepribadian yang tinggi, itulah individu yang dikehendaki oleh Islam, dan manusia akan dapat menciptakan masyarakat yang berkeadaban - masyarakat egalitarianisme.

II. Ideologi Muhammadiyah dan Konstruksi Masyarakat Ideal

Dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad ketika pertama kali datang (hijrah) ke Yastrib (Madinah) yang dikerjakan adalah membangun masjid sebagai pusat segala kegiatan termasuk urusan ekonomi dan politik. Hal ini menandakan, bahwa Nabi memang memberikan perhatian kepada pembentukan karakter manusia yang ber-Tauhid, manusia yang memiliki akhlak mulia, manusia yang dapat berlaku jujur dalam kehidupannya. Perhatian Nabi pada pembentukan manusia yang demikian berimplikasi kepada kehidupan sosial kemasyarakatan, karena manusia adalah makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan orang lain atau dunia diluar dirinya. Istilah Madinah biasa diartikan dengan kota, tetapi banyak ahli mengatakan bahwa Madinah itu bermakna “peradaban”. Masyarakat yang hidup bersama Nabi adalah potret masyarakat yang patut dicontoh oleh manusia yang hidup setelahnya. Risalah Islam disampaikan oleh Nabi di Mekah yang menghabiskan waktu belasan tahun tetapi tidak memberikan hasil yang menggembirakan, maka setelah Hijrah ke Yastrib (Madinah) sebuah kota *waha* atau oase²¹ yang subur sekitar 400 Km sebelah utara Mekah, dakwah Islam berkembang pesat dan berpengaruh luas. Dari kota ini pula Nabi membangun masyarakat madani yang demokratis dan tidak ada diskriminasi atas golongan tertentu, segala urusan sosial, politik dan pertahanan menjadi tanggungjawab bersama masyarakat.

Masyarakat yang di bangun oleh Nabi adalah masyarakat yang berbudi luhur, bermoral tinggi dan itulah masyarakat madani yang berperadaban. Masyarakat madani yang diwarisi oleh Nabi tersebut menurut Madjid bercirikan egalitarianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan prestise seperti keturunan, kesukuan, ras, dan lain-lain), keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan, bukan berdasarkan keturunan.²² Prototipe masyarakat yang dibangun oleh Nabi itulah yang hendak diterjemahkan oleh Muhammadiyah dalam berbagai kegiatan sosial keagamaannya, selain menguatkan kembali tauhid yang benar, tetapi juga menumbuhkan sikap egalitarian yang menjadi ciri dari masyarakat khairah ummah.²³

Dalam doktrin al-Ma’un, Muhammadiyah menegaskan bentuk pemihakan pada konstruksi masyarakat yang ideal, masyarakat khairah ummah, yang adil, tertib dan berkesimbangan. Kyai Dahlan secara radikal telah menunjukkan bentuk Islam berkemajuan dengan memaknai doktrin-doktrin Islam yang diimplementasikan dalam kehidupan nyata, bukan doktrin yang hanya sekedar dipahami, tetapi tidak dijalankan. Dalam Muaqdimah AD Muhammadiyah dinyatakan dengan sangat baik mengenai konstruksi masyarakat ideal itu “..Masyarakat yang sejahtera, aman dan damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan diatas keadilan, kejujuran persaudaraan dan gotong royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pada pengaruh syaitan dan hawa nafsu”. Pernyataan ini memberi pengetahuan bahwa hakekat kehidupan bermasyarakat adalah terciptanya keseimbangan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai kebaikan.

Dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) yang menjadi rujukan ideal bagi warga Muhammadiyah dalam kehidupan bermasyarakat telah dinyatakan bahwa Muhammadiyah mendorong setiap muslim untuk menjalin persaudaraan dengan menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik kepada lingkungan sosial, menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia, mewujudkan kerjasama umat manusia menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin, memupuk jiwa

toleransi, menghormati kebebasan orang lain, menegakkan budi baik, menegakkan amanat dan keadilan, perlakuan yang sama, menepati janji, menanamkan kasih sayang dan mencegah kerusakan, menjadikan masyarakat menjadi masyarakat shalih dan utama, bertanggungjawab atas baik dan buruknya masyarakat dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, berusaha untuk menyatu dan berguna/bermanfaat bagi masyarakat, memakmurkan masjid, menghormati dan mengasihi antara yang tua dan yang muda, tidak merendahkan sesama, tidak berprasangka buruk kepada sesama, peduli pada orang miskin dan yatim, tidak mengambil hak orang lain, berlomba dalam kebaikan dan hubungan-hubungan sosial yang lainnya yang bersifat ishlah menuju terwujudnya masyarakat utama yang diridhai Allah SWT.²⁴

Dalam PHIWM secara umum memberi arah bagi aktivitas warga Muhammadiyah, sementara posisi dan peran sosio-politik Muhammadiyah ditegaskan dalam Khittah Denpasar 2002. Khittah ini menurut saya lahir dalam situasi dimana Muhammadiyah menghadapi konteks politik yang sedang berubah, sekaligus pada saat itu muncul istilah kader terbaik Muhammadiyah untuk menyebut Amien Rais yang akan maju sebagai Capres pada Pilpres 2004. Dengan penyebutan ada semacam beban politik Muhammadiyah untuk menyukseskan pencapresan Amien Rais, itulah yang kemudian diputuskan melalui Rapat Pleno bulan Pebruari 2004 di Yogyakarta yang keputusannya mendukung segala langkah dan peran Amien Rais dan meminta warga Muhammadiyah untuk memilih Capres yang membawa misi reformasi dan perbaikan masyarakat. Keputusan Pleno itu dengan sendirinya diarahkan pada Amien Rais (kader terbaik) yang akan dihibahkan untuk bangsa, akibatnya infrastruktur Muhammadiyah dipergunakan untuk menyukseskan pencapresan Amien Rais.

Meski demikian, Muhammadiyah dalam melaksanakan misi penegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, Muhammadiyah menggunakan dua strategi perjuangan yakni; *pertama*, melalui kegiatan-kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan/kenegaraan (*real politics, politik praktis*) sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat kelembagaan politik. *Kedua*, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung (*high politics*) yang bersifat mempengaruhi kebijakan Negara dengan perjuangan moral (*moral force*) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan Negara sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*).²⁵

Dari pernyataan diatas, tampak terlihat bahwa Muhammadiyah tidaklah berbeda dengan partai politik dalam memainkan peran-peran kebangsaannya, namun kemudian diteruskan mengenai kekhususan perjuangan Muhammadiyah dalam bidang kemasyarakatan dengan menekankan pada pemberdayaan yang bertujuan untuk membentuk masyarakat utama atau masyarakat madani (*civil society*) sebagai pilar utama terbentuknya Negara yang berkedaulatan rakyat. Dengan cara semacam itulah misi menegakkan sebagai *rahmatan lil' alamin* dapat terwujud. Misi kerisalahan dan kerahmatan yang diemban Muhammadiyah tersebut secara nyata diwujudkan melalui berbagai kiprahnya dalam pengembangan amal usaha, program, dan kegiatan yang lahir dari proses mendefinisikan persoalan-persoalan keummatan dengan tujuan untuk membawa kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia. Untuk melengkapi pemahaman pada ideologi Muhammadiyah, perlu juga

membaca secara kritis pernyataan abad kedua yang merinci berbagai gerak langkah Muhammadiyah dan merancang agenda perjuangan masa depan.

Khittah Denpasar menjadi titik point untuk memotret posisinya sebagai kekuatan *civil society*, artinya perbedaan dengan apa yang dilakukan oleh partai politik memang relatif sangat tipis, bahkan tidaklah berbeda jauh, dalam point ketiga Khittah tersebut dinyatakan bahwa “Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan dan pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani (*civil society*) yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kenegaraan sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui pendekatan-pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip-prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan Negara yang demokratis”.²⁶

III. Menuju Ke Arah Praksis Muhammadiyah yang Ideal

Dalam Khittah Ujung Pandang 1971, Muhammadiyah telah menegaskan mengenai hubungannya dengan partai politik dan sekaligus memproklamasikan dirinya sebagai kekuatan *civil society*. Dalam Khittah itu memuat beberapa hal; *pertama*, secara tegas Muhammadiyah menentukan posisi dan sikapnya yang benar-benar netral terhadap politik praktis dan partai politik, yakni tidak memiliki hubungan afiliasi apa pun. *Kedua*, jika Khittah tahun 1969 masih terkandung pemihakan terhadap Partai Muslimin Indonesia, pada Khittah tahun 1971 secara jelas Muhammadiyah menunjukkan kenetralannya dengan meletakkan partai apa pun termasuk Parmusi berada di luar Muhammadiyah, dengan semangat melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar terhadapnya, artinya melakukan fungsi dakwah terhadap kekuatan-kekuatan politik. *Ketiga*, memberi kebebasan politik kepada warga, baik dengan menggunakan hak politiknya maupun tidak, sebagai sikap yang cukup terbuka dari Muhammadiyah. Sikap netral tersebut disempurnakan lagi dalam Khittah Surabaya 1978, yang memuat sikap bahwa Muhammadiyah adalah Gerakan Dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu Partai Politik atau Organisasi apa pun. Lebih dari itu, ditegaskan bahwa setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah.

Ada beberapa pikiran untuk mengembangkan format peran sosial kemasyarakatan Muhammadiyah untuk memperkuat sistem politik yang demokratis, tetapi dengan jalan non politik praktis. (1). Muhammadiyah harus tetap menjadi kekuatan moral yang senantiasa beramar makruf dan bernahi munkar, berjuang demi tegaknya keadilan bagi seluruh rakyat, (2) Muhammadiyah harus menjadi juru bicara bagi aspirasi politik rakyat, (3) Muhammadiyah harus ikut mengawal proses-proses politik dan kebijakan publik, misalnya APBN dan APBN. Muhammadiyah menjadi aspiran dan watchdog terhadap penyusunan dan pelaksanaan anggaran, serta dampak pembangunan terhadap kualitas hidup rakyat, (4) Muhammadiyah harus melakukan pendidikan untuk mempercepat proses demokrasi dengan segala prasyarat dan konsekuensinya, (5) Muhammadiyah dalam dakwahnya harus mendorong kemajuan

untuk terwujudnya peradaban utama, (6) Muhammadiyah harus menjadi referens bagi kemajuan bangsa, dengan menjadikan dirinya sebagai organisasi yang menjunjung tinggi moralitas, demokrasi, keadilan, transparansi dan egalitarianisme, (7) Muhammadiyah harus menjadi zona damai. Artinya, siapapun kader Muhammadiyah yang terlibat konflik politik di partai, ia harus menanggalkan konflik itu dan berinteraksi dengan semangat ukhuwwah, dan (8) Muhammadiyah harus menjadi zona suci. Artinya, setiap kader Muhammadiyah yang mungkin terbiasa korup (semoga tidak ada) di luar, tidak akan membawa kebiasaan buruk itu ke dalam Muhammadiyah. Alih-alih seperti itu, setiap kader Muhammadiyah harus menunjukkan dirinya sebagai kader yang bermoral luhur dan berperadaban tinggi.

Sebuah konstruksi masyarakat madani yang demokratis tidak akan dapat terwujud diatas sistem sosial politik yang otoriter, paternalistik dan feodal. Wawasan etis dan moral menjadi penting bagi munculnya masyarakat yang berperadaban, sebagaimana dinyatakan oleh Nurcholish Madjid berikut "Masyarakat yang demokratis berpangkal dari keteguhan wawasan etis dan moral berazaskan ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat demokratis tidak akan mungkin tegak tanpa masyarakat yang berperadaban, masyarakat madani. Berada di lubuk paling dalam dari masyarakat madani adalah jiwa *madaniyyah*, *civil society*, yaitu keadaban itu sendiri".²⁷

Endnote

¹ Untuk beberapa studi dan kajian tentang Muhammadiyah yang menarik disimak, misalnya Mitsuo Nakamura, *The Crescent Arises Over the Banyan Tree* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983); Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989); MT. Arifin, *Muhammadiyah Potret Yang Berubah* (Surakarta: Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Pendidikan, 1990); dan Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristenisasi di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998), Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010); PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Sosial Keagamaan* (Jakarta: Kompas, 2010)

² Gagasan tentang masyarakat utama dalam rumusan Muhammadiyah sebagai jawaban atas diberlakukannya azas tunggal Pancasila tahun 1985, terinspirasi dari gagasan al-Farabi sebagaimana yang telah disebut sebelumnya, pembahasan mengenai masyarakat utama akan dijelaskan bagian berikut

³ Istilah *Civil society* untuk pertama kali diperkenalkan oleh Ceciro seorang filsuf Romawi yang menyebut dengan *civilis societas*, yang lebih mengacu kepada gejala budaya perorangan atau masyarakat (konsep budaya bila dibandingkan dengan konsep politik). *Civil society* diterjemahkan secara sederhana sebagai masyarakat politik (*political society*) yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup, adanya hukum yang mengatur hubungan dan pergaulan antara individu menandai adanya masyarakat tersendiri. Konsep Ceciro mencakup individu maupun masyarakat secara keseluruhan yang telah memiliki budaya hidup kota yang mengatur norma-norma kesopanan.

⁴ Yang menyebut dengan masyarakat sipil adalah Mansour Fakih, lihat tulisannya *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

⁵ Ryas Rasyid menyebutnya dengan masyarakat kewargaan, lihat tulisannya, “Perkembangan Pemikiran tentang Masyarakat Kewargaan (Tinjauan Teoritik)” dalam *Jurnal Ilmu Politik No. 17*, 1997

⁶ Konsep masyarakat madani digunakan oleh Dawam Rahardjo dan Maswadi Rauf sebagai arti dari civil society yang bagi paling tepat untuk Indonesia, sementara istilah masyarakat sipil, nanti akan muncul masyarakat militer, masyarakat ekonomi dan lain-lain. Istilah masyarakat madani dekat maknanya dengan pemberdayaan masyarakat. Silakan lihat Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani, Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial* (Jakarta: LP3ES dan LSAF, 1999), lihat Maswadi Rauh, “Masyarakat Madani (Civil Society): Akar Demokrasi di Indonesia”, dalam Tim Maula, *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999)

⁷ Selama rezim Orba, kekuatan-kekuatan masyarakat madani tidak bias melakukan kreasi-kreasi terhadap berbagai kegiatan mereka, melainkan dikontrol secara ketat oleh pemerintah. Kita dapat melihat kehidupan berbagai kalangan independen selama rezim tersebut berkuasa. Kalangan pers dikontrol oleh negara melalui Persatuan wartawan Indonesia (PWI) sebagai satu-satunya organisasi wartawan yang diakui oleh negara, kalangan pedagang dan industri dikontrol melalui Kamar Dagang dan Industri (KADIN), kalangan pemuda dikontrol melalui Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), petani melalui HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), kalangan agamawan dikontrol melalui Departemen Agama (Depag) dan sebagainya. Semua kekuatan masyarakat madani tidak boleh memiliki cirri khas sendiri dan harus menggunakan Pancasila sebagai azasnya, yang tidak setuju dengan Pancasila dianggap sebagai organisasi terlarang

⁸ Proses penataran dilakukan sejak mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Pancasila sebagai suatu yang sacral dan berlaku seperti agama. P4 merupakan proses “pembodohan” kepada siswa didik, karena melalui P4 mereka didoktrin tentang pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen, padahal penguasa bersikap, berperilaku dan bertindak sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Antara doktrin yang diterapkan kepada masyarakat dengan praktek dilakukan oleh penguasa terdapat ke-tidaksesuaian antara Pancasila yang berlaku kepada masyarakat dengan Pancasila yang kepada penguasa

⁹ Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani*, (Bandung: Rosdakarya, 1999), hlm. viii

¹⁰ Giuseppe Di Palma, *To Craft Democracies, an Essay on Democratics* (USA: The University of California, 1990).

¹¹ *Ibid.* hlm. ix

¹² *Ibid.* Negara sulit mengkooptasi *dawrah* karena perkumpulan ini tidak mempunyai kepemimpinan formal, karena itu negara menemui kesulitan mengkooptasi mereka. Kasus di Indonesia dengan berkumpulnya berbagai pemimpin agama dari berbagai aliran keagamaan yang eksis di Indonesia, barangkali termasuk dalam kategori demikian, namun ada hal yang sulit untuk dipahami dari berbagai pertemuan berbagai kelompok agama terutama dengan “do’a bersama” untuk kedamaian, sehingga terwujud masyarakat yang teratur. Dari sudut pandang Islam, istilah “do’a bersama” semacam itu yang sering digelar oleh tokoh-tokoh agama tersebut sulit untuk dipahami, selain membingungkan umat tetapi juga do’a semacam itu penuh dengan bias.

¹³ Lihat Aried Subhan, *Indonesia dalam Transisi Menuju Demokrasi* (Jakarta: LSAF, 1999).

¹⁴ David Beetham & Kevin Boyle, *Introducing Democracy: 80 Questions and Answers* (Paris: UNESCO, 1995) edisi terjemahan Kanisius, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, hlm.158

¹⁵ Mansour Fakhri, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 59

¹⁶ Nurcholis Madjid, “Budaya Nasional Masyarakat Madani dan Masa Depan Bangsa”, dalam Tim Maula, *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani Dalam Kultru Feodal* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 264-265

¹⁷ Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm., lihat Maswadi Rauf dalam, *Op. Cit.*

¹⁸ Maswadi Rauh, *Op. Cit.* hlm. 304

¹⁹ Persoalan dalam penyelenggaraan negara kita (Indonesia) adalah banyaknya praktek ketidakadilan, manipulasi, tindakan yang tidak bermoral dari sementara aparat yang merugikan masyarakat. Sila kelima dari Pancasila dianggap sebagai sila yang paling “sial” dari seluruh sila dalam Pancasila, karena keadilan sosial hanya ada dalam konsep dan tidak dipraktikkan oleh penyelenggara negara secara bertanggung-jawab. Lihat Nurcholis Madjid, “Menuju Masyarakat Madani”, dalam Tim Maula, *Op. Cit.* hlm. 321

²⁰ Anggaran Dasar Muhammadiyah tahun 1985. Rumusan tujuan baru Muhammadiyah tersebut merupakan hal baru setelah organisasi ini di deklarasikan pada tahun 1912, dimana Islam merupakan azas organisasi. Dalam rumusan baru azas tersebut, dimana Islam masih tetap menjadi sumber inspirasi, rujukan segala kegiatan serta dakwah *amar ma’ruf nahi munkar* tetap ditegakkan

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.* hlm. 324

²³ Masyarakat ideal yang dibangun Nabi di Yatsrib tidak bertahan lama, karena berlangsung hanya sampai pada kepemimpinan Islam generai awal yakni masa khulafaur Rasyidun, setelah itu masyarakat di jazira Arabia yang telah ditaklukan oleh Nabi kembali kepada sistem sosial yang berlandaskan keturunan, suku, ras dan etnik. Semangat egalitarianisme Islam hilang dalam kehidupan masyarakat. Dinasti-dinasti yang terbentuk setelah itu sebagai contoh terbaik, betapa spirit Islam telah terganti oleh sistem yang berdasarkan garis keturunan dan geneologis.

²⁴ PP Muhammadiyah, *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2002).

²⁵ PP Muhammadiyah, “Khittah Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, *Keputusan Tanwir Denpasar Bali 2002*.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Nurcholish Madjid, *op. Cit.*, hlm. 328